



Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara

Ridho Harta¹⁾, Yaya Mulyana²⁾, Bambang Agusdiana³⁾, Yayan Andri⁴⁾, Nur Ambia Arma⁵⁾

Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Indonesia¹⁾

Universitas Pasundan, Kota Bandung, Indonesia²⁾

Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Indonesia³⁾

Universitas Muhammadiyah Bandung, Kota Bandung, Indonesia⁴⁾

Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Indonesia⁵⁾

ridho@ecampus.ut.ac.id¹⁾

yaya_mulyana@unpas.ac.id²⁾

bambangad@ecampus.ut.ac.id³⁾

yayan.andri@umbandung.ac.id⁴⁾

nurambia@ecampus.ut.ac.id⁵⁾

Abstrak

Pembangunan Infrastruktur baik darat, laut maupun Infrastruktur udara (bandara) untuk mendukung ibu kota baru yang sudah tentunya dalam proses pelaksanaannya membutuhkan implementasi kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Ibu kota yang berkelanjutan. Menggunakan empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan yaitu *Bureaucracies as agencies for implementation; Implementation by degree; Vertikal versus horizontal implementation; dan Condition that promote implementation*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasi kebijakan. Walaupun peneliti melihat dalam parameter *Vertikal versus horizontal implementation* yang mana berkaitan dengan sumber daya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja sehingga sebgaiian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN. Begitupun terkait Parameter *Condition that promote implementation* yang berkaitan dengan lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu arah terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Infrastruktur, Pembangunan

Abstract

Infrastructure development, both land, sea, and air infrastructure (airport) to support the new capital city, which of course in the implementation process requires strategic policy implementation in realizing a sustainable capital city. Using a four-variable model of the implementation policy framework, namely Bureaucracy as an implementing institution; Implementation by degree; Vertical versus horizontal implementation; and Conditions that encourage implementation. The research method used in this study is



descriptive analysis with a qualitative research type. The results of the study indicate that the Implementation of the National Capital City Infrastructure Development Policy has been running well based on the implementation policy framework model. However, researchers look at the parameters of vertical versus horizontal implementation related to resources, especially financial resources, which can be said to have an impact on the sustainability and continuity of the development of the IKN infrastructure in the future. The researchers found that the budget issued from the APBN was only 20% so most of the budget is estimated to have support from investors, so researchers analyze if something happens to investors, this will impact the absence of IKN development. Likewise, regarding the Condition Parameters that drive the implementation related to the political environment that will determine the desire and Commitment to developing this Infrastructure, the researcher sees that the 2024 political map will be a direction for the sustainability and desire for developing the IKN infrastructure, apart from the financial resource factor (Funding), Investors and political map factors and the role of supervision, evaluation of each implementation progress made.

Key words: Policy Implementation, Infrastructure, Development

PENDAHULUAN

Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara tentu dalam proses praktiknya membutuhkan dukungan dari semua stakeholder dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun untuk menunjang Ibu Kota Negara merupakan infrastruktur yang sifatnya mendasar dan urgent yang mesti harus segera di tuntaskan seperti, infrastruktur Darat (Akses Jalan, Tol, Jembatan), Infrastruktur Laut (Pelabuhan Untuk transportasi Logistik), Infrastruktur Udara (Bandara yang langsung menuju Titik lokasi IKN), yang mana infrastruktur tersebut merupakan infrastruktur utama yang akan menunjang berlangsungnya pembangunan dan persiapan pembangunan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dan lain sebagainya.

Melalui pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara maka semakin memperkuat dalam pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru yang sudah mau berlangsung tiga tahun berjalan, yang mana telah menarik daya semangat baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah untuk terus gencar melakukan dukungan kepada otorita dalam pembangunan infrastruktur baik darat, laut dan udar. Adapun Balikpapan dan Samarinda yang mana sebagai Kota penyangga Ibu Kota Baru, dalam pembangunan infrastruktur tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun daerah hal ini menjadi satu kesatuan dalam mempersiapkan diri karna dampak pemindahan ibu kota ini berdampak juga kepada kota-kota penyangga.

Keberhasilan dalam mempersiapkan Infrastruktur tersebut tentu tidak terlepas dari andil adanya dukungan berbagai stakeholders. Sehingga upaya untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk ibu kota baru sebagai prasarana transportasi dasar terdapat berbagai hal dalam suatu proses Implementasi Kebijakan Infrastruktur di laksanakan, yang mana harus memperhatikan Standar Operasional Prosedur/ Rencana Aksi Program, supaya berbagai tindakan dalam proses Implementasi di lakukan bisa berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu melalui beberapa jurnal kredibel yang terindeks level nasional memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada penjabaran yang ada sebagai berikut : Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alinda Dewi Trisnawati et. al (2023) yang dalam penelitiannya berupaya menganalisis terkait Penyusunan Scenario Planning terkait pemindahan ibu kota negara (ikn). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan hasil penelitiannya bahwa Keputusan pemindahan ibu kota negara akan menjadi proyek publik terbesar dan terpenting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Penting untuk dipahami semua pihak, faktor penghambat dan pendorong dalam kebijakan pembangunandan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN sebagai potensi ekonomi yang besar harus tetap mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek geografis, aspek ekonomi dan aspek geopolitik. Oleh karena itu harus didukung semua pihak agar dapat berjalan efektif.



Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yaya Mulyana et. al (2023) yang dalam penelitiannya berupaya menganalisis terkait strategi kebijakan penataan infrastruktur ibu kota baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Hasil penelitiannya Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru, Kolaborasi yang berlangsung antar stakeholders terkait Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov. Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat, sudah berjalan dengan baik walupun belum optimal berdasarkan proses Kolaborasi yang di kemukakan Ansell dan Grash antara lain, 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahayu et. al (2023) yang dalam penelitiannya berupaya menganalisis terkait Culture Shock Penduduk Desa Sekitar Titik Pusat Nusantara Dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hasil penelitiannya bahwa Penetapan dan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat fenomena yang disebut dengan culture shock terjadi di salah satu desa terdekat dari titik pusat pembangunan Nusantara yaitu desa Bukit Raya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi Jaya et. al (2022) yang berupaya menganalisis terkait Analisis Kebijakan Publik Pemindehan Ibu Kota Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang mana hasil penelitiannya bukan hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan saja, tetapi juga mengelaborasi tanggapan dari para pemangku kepentingan. Pro dan kontra dalam persiapan, pembangunan dan pemindehan ibu kota terutama dalam hal pembiayaan/pendanaan serta bagaimana implikasi ekonominya, termasuk potensi kegagalan, dampak sosial, ekologis, dan pembelajaran dari beberapa negara.

Dalam proses Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru tentunya dalam kontek ini perlu adanya dukungan dari stakeholders yang terpadu supaya proses implementasi berjalan dengan baik serta sesuai dengan harapan. Sebagaimana yang penulis cermati dari penelitian-penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada pemindehan ibu kota negara, peran serta masyarakat lokal serta stakeholders lainnya. Berbeda dengan beberapa penelitian yang ada sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menganalisis pada bagaimana implementasi dari suatu pelaksanaan kebijakan dengan model implementasi kebijakan Larry N. Gerston (2015). Pendekatan tersebut digunakan sebagai pisau analisa penulis dalam menganalisis pelaksanaan pembangunan ibu kota negara (ikn). Maka dari itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki keunggulan dalam aspek analitis dengan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Larry N. Gerston (2015) sebagai kebaruaran atau state of the art dalam penelitian yang penulis lakukan untuk mengisi gap kekosongan yang ada pada penelitian sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti perlu mendalami Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (ikn) yang sedang di lakukan dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas baik infrastruktur darat, laut, udara yang berkelanjutan dan sesuai dengan harapan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berdiri pada paradigma interpretatif, yang berarti meneliti bagaimana realitas dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat secara bermakna (Neuman, 2017). Tujuan dari penggunaan metode kualitatif ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang sifat obyektif dari berbagai gejala dan fenomena yang diteliti serta menganalisis kejadian yang ada dan kemudian melaporkan hasil penelitian tersebut kedalam narasi (Craswell, 2021). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang fenomena yang dikaji dalam implementasi kebijakan pembangunan Infrastruktur ibu kota negara. Sehingga penelitian kualitatif sangat tepat untuk peneliti gunakan dalam penelitian terkait dalam implementasi kebijakan pembangunan Infrastruktur ibu kota negara.

Sumber data dalam penelitian ini peneliti bagi kedalam dua bagian, data primer dan data

sekunder. Data primer merupakan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi wawancara mendalam pada saat penelitian dengan para informan penelitian yang berhasil penulis dapatkan selama melakukan penelitian. Sedangkan data sekunder yang hendak dikaji adalah telaahan terhadap fenomena yang sedang berlangsung yaitu proses pelaksanaan pembangunan ibu kota negara (ikn).

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang umum digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel terhadap sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini, mereka yang benar-benar mempertimbangkan informasi terbaik tentang apa yang kami harapkan (Craswell, 2021). Adapun informan yang diwawancarai peneliti dianggap sebagai orang yang paling berpengetahuan dan berkompeten dalam Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (ikn) adalah pihak otorita, PUPR, Bapenas, DPR RI, Pemerintah Kab. Penajam, Warga Lokal, akademisi, pegiat media sosial dll.

Data hasil penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan, melalui: (1). Wawancara, wawancara mendalam dimana peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang memahami masalah yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan, namun pada praktiknya pertanyaan yang diajukan saat wawancara lebih bersifat terbuka (2). Observasi, observasi artinya pengamatan secara langsung dan penuh perhatian terhadap suatu hal, kegiatan, dan keadaan tertentu. Observasi bertujuan untuk mengamati dan mencatat tanda-tanda yang terlihat pada subjek penelitian dalam kondisi yang berkesinambungan terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, (3) Dokumentasi, yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang ditulis oleh subjek studi atau orang lain. Dokumen yang dipakai, ialah buku, jurnal dan laporan-laporan yang terkait dengan implementasi Pembangunan IKN.

Guidance theory yang digunakan dalam riset ini adalah Larry N. Gerston (2015) Empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan (1). Bureaucracies as agencies for implementation, birokrat sangat diperlukan dalam usaha meraih kesuksesan dari suatu kebijakan. Dalam masyarakat yang sangat kompleks, birokrat kerap dituntut untuk mengelaborasi pendekatan alternatif terhadap suatu masalah dalam menterjemahkan kebijakan kedalam program konkret dan melaksanakan program tersebut. (2). Implementation by degree, keputusan untuk membuat kebijakan atau undang-undang bukanlah penentu dalam kepastian penerapannya. Hal ini dikarenakan kegiatan pemerintah berlangsung dengan kecepatan yang lambat dan tidak terarah. Namun untuk memastikan setiap tindakan dapat dilaksanakan, diperlukan adanya kepatuhan dan kerjasama oleh semua tingkatan dalam kerangka kebijakan, mulai dari lembaga pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan sampai warga negara yang notabene adalah penerima dampak kebijakan yang di buat oleh pemerintah. (3). Vertikal versus horizontal implementation, Upaya implementasi dapat dilaksanakan pada lintas tingkat pemerintahan. Ketika kebijakan publik mengalami peningkatan dalam kompleksitas dan dalam lapisan interaksi kegiatan implementasinya dapat melampui dimensi vertikal dan horizontal dari birokrasi dan proses politik. (4). Condition that promote implementation, beberapa keadaan yang dapat memfasilitasi upaya implementasi diantaranya : Pendanaan yang layak, ketentuan, sebagai komitmen terhadap tujuan sosial secara umum yang dibuat melalui program yang diambil dari yang sudah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bureaucracies as agencies for implementation

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang mana peneliti melihat dari tatanan birokrasi mesti di lakukan dengan tahapan-tahapan yang telah di tentukan, sehingga bisa terhindari dari terjadinya multi interpretasi dan menimbulkan konflik diantara para agen pelaksana/ implementor, dalam ukuran dan tujuan kebijakan pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Otoritas IKN Direktur Pariwisata dan ekonomi kreatif IKN.

“Bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur ibu kota negara (ikn) yang per hari ini sudah memasuki 20 % lebih dari keseluruhan. Yang mana semua proses yang hari ini di kerjalan mengikuti setandar baku yang telah di tetapkan dalam artian mengikuti alur birokrasi yang begitu panjang dan tidak mudah, maka kami sebagai otoritas sebagai implementor di lapangan dengan pihak PUPR yang senantiasa berhati-hati dalam melakukan pembangunan infrastruktur ini yang mana selalu memperhatikan standar dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ini. Kenapa hal tersebut saya sampaikan supaya pembangunan infratsruktur ini dapat di rasakan secara berkelanjutan puluhan dan ratusan tahun ke depan serta dalam proses pembangunan ini senantiasa di barengan Komitmen yang pasti dari para agen birokrasinya”. (hasil wawancara, 29 November 2023).

Begitupun yang peneliti temukan dilapangan melihat proses pembangunan infrastruktur yang begitu besar dan begitu kompleks, kenapa dikatanya begitu kompleks karna melingkupi pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara yang peneliti menilai perlu alur-alur birokrasi yang begitu panjang. Untuk mengagenda aksikan pembangunan Jalan, Pembangunan Tol, Pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, pembangunan gedung-gedung yang terus gencar dilakukan oleh implementor yaitu Pihak otorita ibu kota negara (ikn) dan Kementerian terkait seperti PUPR dan kementerian terkait. sehingga peneliti melihat pembangunan dengan menerapkan konsep dan standar baku yang telah di buat sehingga dalam proses implementasinya alur birokrasi dilaksanakan dengan penuh kehati-hati karna hal tersebut merupak sesuatu hal yang sifat *crusial*.

Implementation by Degree

Untuk memastikan supaya kegiatan implementasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya kepatuhan dan kerjasama dari semua unsur agen pelaksana kebijakan. Dalam hal ini sebagai liding sektor pihal otorita begitupun di dukung oleh kementerian terkait baik itu PUPR, Bappenas dan kementerian terkait lainnya dalam proses implementasi berlangsung saling bersinergi dan berelaborasi dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara. Sebagiman yang di sampaikan oleh tokoh warga di Kecamatan Sepaku mengatakan bahwa :

“ *kami sebagai warga melihat dan menilai para pelaku pembangunan infrastruktur ibu kota negara (ikn) ini sudah begitu menunjukkan keseriusan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang mana kami menilai para implementor atau pelaksana telah menunaikan janji seperti menepati pembayaran untuk pembebasan lahan, kemudian mereka sudah mulai memukim di kawasan ibu kota negara hal ini, menunjukkan keseriusan dari implementor atau pelaksana dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara Ini*”. (Hasil wawancara, 30 November 2023).

Namun menurut peneliti berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa implementor atau pelaksana harus memiliki kesamaan tujuan dalam membangun kepercayaan yang di barengi dengan sikap solid sesama implementor untuk menghindari konflik internal implementor. Sehingga keinginan untuk mencapai pembangunan infrastruktur ibu kota negara yang berkualitas dan berkelanjutan serta optimal merupakan hal yang penting dan menjadi tujuan para implementor.

Tanpa adanya tujuan bersama maka akan kesulitan dalam meraih keinginan untuk ketercapaian pembangunan ibu kota negara yang ber visikan kota berkelanjutan di Dunia, sebagai penggerak ekonomi indonesia dimasa depan, menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa indonesia, berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar RI tahun 1945. Untuk mencapai visi tersebut merupakan suatu pekerjaan berat dan di serta tanggung jawab dan saling percaya antara sesama aktor terkait dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) ini.



Sehingga bentuk hasil dalam mencapai tujuan pembangunan infratsruktur ibu kota negara ini akan berdampak besar kepada penerima dampak, tidak hanya untuk pemerintah saja melainkan untuk semua warna negara Indonesia. Begitupun yang peneliti temui di lapangan dimana peneliti menemui Setwan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang peneliti rasa ini ada relevansinya sebagai wakil dari masyarakat pribumi penajam paser utara. Sebagaimana yang di sampaikan Setwan DPRD Penajam Paser Utara :

“Kami selalu membahas terkait nasib warga lokal dengan para Dewan dari setiap dapil terutama dapil yang terkena dampak dari pembangunan ibu kota negara ini, yang mana dalam setiap progresnya kami selalu berkomunikasi dengan setiap elemen sehingga segala hal bentuk bisa di komunikasin dengan baik. seperti terkait pembebasan lahan warga yang respek begitu cepat dari otorita menanganinya”

Vertical Versus Horizontal Implementation

Sebagai aktor implementor baik dari lepel atas sampai bawah dalam artian pemerintah dengan implementor agen pelaksana mesti begitu dinamis baik interaksinya dan hal ihwal lainnya. Terkhusus dalam memperhatikan kesiapan sumber daya yang menjadi penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan di implementasikan, tentu berkaitan dengan pelaksanaan yang tentunya tidak terlepas dari dua indikator yaitu sumber daya finansial dan sumber daya manusia (sdm) dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara.

Berdasarkan analisa peneliti, Sumber daya dalam pembangunan infrastruktur Ikn sangat memadai dan sangat kompetitif di bidangnya hal tersebut di buktikan telah berhasilnya di bangun dua jembatan penghubung dan bendungan yang begitu besar serta infrastruktur lainnya baik yang sudah rampung maupun yang masih dalam proses pengerjaan. Hal tersebutpun tidak terlepas dari bagaimana sinkonisasi antara pemerintah di pusat dengan agen pelaksana atau implementor di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh pihak otorita tatkala di jumpai oleh peneliti.

“terkait pengerjaan yang sudah mau berjalan tiga tahun ini bisa dikatan cukup draktis perkembangannya. Yang mana kita mulai dengan pembangunan infratsruktur dasar sampai dengan hari ini yang bisa di katakan sudah mau 20 % nya lebi proses pembangunan ibu kota negara di lakukan, hal tersebut di tunjang oleh Sumber daya manusia yang memadai dan menerapkan sistem kinerja nonstop atau 24 Jam” (hasil wawancara, 29 November 2023).

Begitupun yang peneliti temukan di lapangan bahwa terkait sumber daya manusia dalam proses Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) ini melibatkan berbagai stakeholder terkait baik dari unsur pemerintah pusat maupun daerah, unsur non pemerintah seperti swasta dan stakeholder lainnya hal tersebut membuktikan bahwa lepel atas dengan bawah menunjukkan keseriusan dalam pembangunan ibu kota negara ini.

Kemudian berikutnya terkait sumber daya finansial yang bisa di katakan krusial juga dalam mendukung dan menunjang proses berlangsung suatu Implementasi di lakukan. Karena pada prinsipnya yang peneliti temukan di lapangan bahwa dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) sebagian besar mengandalkan dana dari pihak swasta. Maka dalam hal proses implementasi pembangunan infrastruktur ibu kota negara tentunya diperlukan anggaran yang cukup besar supaya proses implementasi pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) tidak terhambat. hal tersebut berkaitan dengan sumber daya finansial sebagaimana yang di sampaikan oleh pihak otorita :

“Terkait keuangan dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara ini yang telah kita ketahui bersama bahwasannya anggaran yang di sediakan oleh APBN hanya 20% nya saja, sehingga sisanya menunggu kerjasama dengan pihak investor” (hasil wawancara, 29 November 2023).



Conditions That Promote Implementation

Berdasarkan hasil analisa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur dikarenakan faktor eksternal yaitu salah satunya dukungan dan minat dari investor yang akan menjadi penentu keberlanjutan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN). Hal tersebut harus di topang oleh lingkungan sosial yang nyaman supaya para aparatur sipil negara, investor, masyarakat ada ketertarikan untuk hidup di ibu kota negara.

Kalau dalam aspek ekonomi, sosial dan politik yang peneliti lihat begitu berkembang hal ini menandakan adanya kehidupan dengan mobilitasnya aktifitas baik proyek maupun masyarakat. Begitupun terkait faktor politik yang akan menentukan keberlanjutan amanat konstitusi ini, maka peta politik 2024 pun peneliti mengira akan menjadi suatu pengaruh terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur ibu kota negara, selain dari faktor sumber daya finansial yang layak dalam mendukung implementor, adapun aktor privat seperti investor serta faktor peta politik.

Selain yang peneliti utarakan di atas maka peran pengawasan dan evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan terutama oleh pihak pemerintah. Pengawasan partisipatif sangat di perlukan dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara terutama dalam pelaporan terkait hal ihwal keuangan yang keluar jangan sampai biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang di rencanakan. Begitupun yang peneliti temui dilapangan bahwa dalam keterbukaan hal anggaran pembangunan infrastruktur ibu kota negara harus senantiasa terbuka supaya tidak ada aktor makelar yang menjadi dalang keburukan dalam mega proyek ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasinya. Walaupun peneliti melihat dalam parameter Sumberdaya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan krusial dan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja, sehingga sebagian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor, maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN.

Begitupun terkait faktor Lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu penentu terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat diberikan bahwa melalui Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di harapkan dapat menjadi landasan pemikiran dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) serta menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang administrasi publik utamanya dalam teori implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda Dewi Trisnawati et. al (2023). Penyusunan Scenario Planning Terkait Pemindahan ibu Kota Negara (IKN). Jurnal Paradigma. Universitas Mulawarman.
<file:///C:/Users/user/Downloads/13550-37514-1-PB.pdf>
- Annisa Rahayu et. al (2023). Culture Shock Penduduk Desa Sekitar Titik Pusat Nusantara Dengan Adanya Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jurnal Paradigma. Unesa.
<file:///C:/Users/user/Downloads/57727-Article%20Text-125332-1-10-20231212.pdf>
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta



- Creswell. John W. 2021. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ke Lima*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Gerston, Larry A. 2015. *Public Policy Making: Process and Principles Third Edition*. New York: Roulledge
- Howlett, Michael. 2018. "Moving Policy Implementation Theory Forward: a Multiple streaming/ Critical Juncture Approach" *Public Policy and Administration* No. 1-26
- Neuman, W., Lawrence. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks
- Suryadi Jaya et. al (2022). Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara . Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/3486>
- Tummers, Lars & Bekkers Victor. 2014. "Policy Implementation, Street Level Bureaucracy and the Importance of Discretion". *Public Management Review* 16, No. 4: 527-547
- Winarno, Budi. 2007. *Model Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo, 2007
- Yaya Mulyana et. al (2023) Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru. Jurnal Kebijakan. Universitas Pasundan. <file:///C:/Users/user/Downloads/8324-Article%20Text-37154-1-10-20230630.pdf>

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
- Buku Saku Ibu Kota Negara